

**BIAS MEDIA DALAM PEMBERITAAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**  
(Analisis Ekonomi Politik Media dalam Pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja di *Harian Kompas* dan *Kompas.id* pada Periode 19 Oktober 2019 – 5 November 2020)

Nyoman Bagus Wibisana, S. Rouli Manalu, Triyono Lukmantoro

[nyomanbewe@gmail.com](mailto:nyomanbewe@gmail.com)

**Program Studi S1 Ilmu Komunikasi**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 746 5407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

Mass media has a role to inform the public about public policy because they are not directly included in the process of public policy-making. In mediating reality, mass media has media performance standards to uphold in how they inform the public as per public interest. However, mass media does not reflect reality as it is, rather they construct reality influenced by varieties of different factors, whether from inside or outside organization. From the approach of the critical political economy of media, mass media are seen as structurally influenced by inequality of wealth and power in society in which news could be biased towards the ruling class. Using the Propaganda Model of Herman and Chomsky as a theoretical framework, this research seeks to uncover how mass media, specifically *Kompas*, performs in their coverage of UU Cipta Kerja. Using qualitative content analysis methods to analyse 543 news articles of *Harian Kompas* and *Kompas.id*, researcher found that, in terms of sources and frames, the patterns of news indicate there is plurality rather than pro-government and pro-business bias. In terms of economic ideology, researcher found that there are constraints in economic and labour discussion that indicated there is pro-government and pro-business bias. The contradictions show that there is complexity, contestation, and ambivalence in *Kompas* news coverage about UU Cipta Kerja in contrast to instrumental media views that the coverage of mass media will be static and deterministic in favour of the ruling class. Thus, researcher found novelty in media performance research, specifically in reporting about public policy, using the approach of critical political economy of media.

**Keywords: critical political economy of media; media performance. propaganda model; uu cipta kerja**

## ABSTRAK

Media massa memiliki peran untuk menginformasikan kepada publik tentang kebijakan publik karena mereka tidak terlibat secara langsung dalam proses pembentukan kebijakan. Dalam proses mediasi realita tersebut, media massa memiliki standar performa media yang perlu ditegakkan dalam proses menginformasikan berita sesuai dengan kepentingan publik. Namun, media massa tidaklah merefleksikan realita apa adanya, melainkan mereka mengonstruksi realita yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Dari pendekatan ekonomi politik kritis media, media massa dilihat dipengaruhi secara struktural oleh ketimpangan kekayaan dan kekuasaan di masyarakat sehingga berita dapat bias terhadap kepentingan kelas penguasa. Menggunakan Model Propaganda oleh Herman dan Chomsky sebagai kerangka teori, penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana media massa, spesifiknya *Kompas*, memberitakan kebijakan UU Cipta Kerja. Menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk menganalisis 543 artikel *Harian Kompas* dan *Kompas.id*, peneliti menemukan bahwa, di sisi narasumber dan bingkai, pola pemberitaan mengindikasikan adanya pluralitas daripada bias pemerintah dan pebisnis. Di sisi ideologi ekonomi, peneliti menemukan terdapat batasan dalam diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan yang mengindikasikan adanya bias pemerintah dan pebisnis. Kontradiksi tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan dipenuhi dengan kompleksitas, kontestasi, dan ambivalensi daripada pandangan instrumental yang melihat berita secara statik dan deterministik akan menguntungkan kelas penguasa. Maka, peneliti menemukan aspek kebaruan dalam penelitian performa media, spesifiknya dalam memberitakan kebijakan publik, menggunakan pendekatan ekonomi politik kritis media.

**Kata kunci: ekonomi politik kritis media; performa media; model propaganda; uu cipta kerja.**

## PENDAHULUAN

Pada Senin, 5 Oktober 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang melingkupi sepuluh bidang kebijakan: ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; ketenagakerjaan; kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; pengadaan tanah; kawasan ekonomi; investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional; pelaksanaan administrasi; dan penerapan sanksi. Pertama kali

diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo saat pidato pelantikannya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tersebut diundangkan untuk memenuhi Visi Indonesia 2045 menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan Produk Domestik Bruto sebesar 7 triliun dollar AS (Lingga, 2019).

Namun, proses pembentukan UU Cipta Kerja tersebut memunculkan dinamika pro dan kontra. Beberapa penelitian, di satu sisi, berpendapat bahwa UU Cipta Kerja mengatasi aturan tumpang tindih di Indonesia yang menghambat

investasi (Catur et al, 2020; Ginting, 2021) dan mempercepat perjanjian investasi (Damuri et al, 2021) sehingga dapat meningkatkan investasi yang kemudian dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja (Julianti, 2021; Marbun et al, 2020). Namun, di sisi yang lain, penelitian lainnya berpendapat, dari sisi prosedur, bahwa UU Cipta Kerja melanggar UU No. 11 Tahun 2012 (Setyawan, 2020), serta dari sisi substansi, UU Cipta Kerja dinilai abai pada sektor lingkungan (Amania, 2020), merugikan petani dan buruh (Hendriyanto, 2020; Mahy, 2021), dan dianggap hanya menguntungkan para oligark dan pebisnis (Koalisi Bersihkan Indonesia, 2020).

Dinamika pendapat pro dan kontra dalam pembentukan kebijakan menunjukkan terdapat beragam perspektif dalam melihat sebuah permasalahan dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan yang akhirnya menjadi sebuah kebijakan. Namun, dalam pembentukan kebijakan publik, masyarakat sendiri tidak dilibatkan secara langsung; melainkan proses berlangsung antara koalisi grup kepentingan atau antara pejabat dengan pejabat lainnya (Blomkamp et al, 2016). Karena masyarakat tidak terlibat secara langsung, dinamika pembentukan kebijakan tersebut perlu disampaikan kepada masyarakat secara komprehensif supaya pro dan kontra sebuah kebijakan

dapat dinilai sendiri oleh masyarakat; dan, utamanya, untuk memastikan jalannya pemerintahan yang demokratis.

Dalam konteks tersebut, peran media massa menjadi hal yang sentral. Media massa memiliki peran menyalurkan informasi, mengedukasi masyarakat atas informasi tersebut, platform diskusi politik dan fasilitator opini publik, dan berperan sebagai *watchdog* terhadap pemerintah (McNair, 2011: 19). Dijelaskan secara lebih detail, peran media massa nasional dijelaskan di UU Pers pasal 5 ayat (a) sampai (e) di mana keseluruhan pasal tersebut menunjukkan bahwa media massa dalam struktur, perilaku, dan performanya perlu untuk menjunjung kepentingan publik (*public interest*).

Namun, dalam proses mediasi realita politik tersebut, media massa tidaklah “mencerminkan” realita, tetapi media massa mengkonstruksi realita yang dipengaruhi oleh beragam faktor yang dapat dilihat pada level sistem sosial, institusi, organisasi, rutinitas, dan individual (Shoemaker & Reese, 2013). Konten media massa merupakan arena simbolik yang merepresentasikan beragam level pengaruh tersebut sehingga dapat memberikan peta bagaimana representasi itu ditampilkan di media massa. Karena terdapat ketimpangan kekuasaan dan distribusi privilese di dalam masyarakat, maka konten media pun juga tidak akan

merepresentasikan masyarakat secara menyeluruh – disparitas representasi akan merefleksikan ketimpangan kekuasaan dan privilese tersebut (Reese & Lee, 2012). Dalam konteks tersebut, pendekatan ekonomi politik media berusaha untuk mengungkap bagaimana ketimpangan tersebut dapat mempengaruhi konten media massa.

Jika ketimpangan kekayaan dan kekuasaan dapat mempengaruhi pemberitaan tentang sebuah kebijakan, dalam konteks ini adalah UU Cipta Kerja, supaya menguntungkan kelas penguasa, yakni pemerintah dan pebisnis; maka, standar performa media tidak dijalankan oleh media tersebut. Dampaknya, masyarakat tidak dapat menilai secara komprehensif pro dan kontra sebuah kebijakan serta berimplikasi tidak berjalannya pemerintahan yang demokratis. Maka dari itu, penelitian performa media penting untuk dilakukan untuk melihat apakah media telah menjalankan kepentingan publiknya.

Variasi bentuk platform dan konten media massa kembali ke pengaruh struktur organisasi dari tiap perusahaan tersebut. *Kompas* dipilih sebagai media massa yang akan diteliti karena, selain merupakan media elite dan terbesar di Indonesia (Keller, 2009; Andres, 2016), *Kompas* merupakan platform yang dapat membahas seluk beluk dan dinamika pro-kontra dari

sebuah isu secara mendalam. Dengan meneliti, salah satu media elite nasional, peneliti berharap dapat mengetahui wawasan tentang performa atau sistem berita nasional. Limitasi tersebut akan diimbangi dengan kedalaman penelitian yang akan menelusuri pemberitaan sejak awal UU Cipta Kerja dibahas sampai dengan disahkan.

Melihat dari penjelasan di atas, maka penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana konsekuensi faktor ekonomi politik mempengaruhi pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja di *Harian Kompas* dan *Kompas.id*? Dari pertanyaan tersebut, penelitian ini mencoba untuk menelusuri secara mendetail siapa narasumber yang sering muncul dalam pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja; apa bingkai yang sering muncul dalam pemberitaan undang-undang cipta kerja; dan apa ideologi ekonomi yang dominan dalam pemberitaan undang-undang cipta kerja.

## **TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh ekonomi politik terhadap pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja di *Harian Kompas* dan *Kompas.id*. Pengaruh tersebut akan ditelusuri secara mendetail di sisi narasumber, bingkai, dan ideologi ekonomi yang muncul dalam pemberitaan.

## KERANGKA TEORI

### Ekonomi Politik Media

Ekonomi politik memiliki makna asal “tradisi pemikiran ekonomi yang melihat produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang digunakan untuk menopang kehidupan manusia” (Hardy, 2014: 4). Hardy (2014) berpendapat terdapat tiga cabang dari ekonomi politik: neoklasikal ekonomi, *positive political economy*, dan *critical political economy*. *Critical political economy* atau ekonomi politik kritis diartikan oleh Hardy dengan pendekatan yang menekankan pada “distribusi kekuasaan yang tidak merata dan kritis terhadap tatanan di mana ketidaksetaraan tersebut dipertahankan dan direproduksi” (Hardy, 2014: 6).

Pendekatan ekonomi politik kritis berbeda dengan pendekatan ekonomi politik lainnya karena pendekatan tersebut bersifat: *holistic*, yakni melihat ekonomi memiliki hubungan dengan politik, sosial, dan budaya; *historical* yang berarti melihat perubahan peran secara jangka panjang dari negara, korporasi, dan media; fokus pada keseimbangan antara perusahaan privat dan intervensi publik; dan yang paling penting pandangan ekonomi politik kritis melampaui isu teknis tentang efisiensi – bagaimana pasar beroperasi – dan mempertanyakan pertanyaan mendasar tentang keadilan, kesetaraan, dan

kepentingan publik (*public good*) (Murdock & Golding, 2005: 61 dikutip di Hardy, 2014: 9-10).

Pada kajian ilmu komunikasi, Hardy mengatakan segala kajian komunikasi yang dikaitkan dengan aspek politik atau ekonomi dapat dikatakan sebagai analisis ekonomi politik (Hardy, 2014: 6). Mosco (2008: 6) melihat ekonomi politik komunikasi sebagai “pertukaran makna sosial yang hasilnya menjadi ukuran atau batasan pada hubungan sosial”.

Dari lima tendensi umum pada penelitian ekonomi politik, penelitian ini masuk pada tendensi ketiga, fokus pada pencarian riset dari perspektif alternatif (Mosco, 2008: 104). Perspektif alternatif itu adalah ekonomi politik kritis media yang mengkaji tentang “bagaimana organisasi politik dan ekonomi dari industri media mempengaruhi produksi dan sirkulasi dari makna, dan menghubungkannya dengan distribusi sumber daya simbolis dan material yang memungkinkan orang untuk memahami, berkomunikasi, dan bertindak di dunia” (Hardy, 2014: 9). Secara spesifik, penelitian ini akan fokus pada aspek konten media karena, dari perspektif ekonomi politik kritis media, media massa merupakan “industri budaya yang memiliki peran penting dalam mengkonstruksi citra atau diskursus di mana masyarakat memahami dunia” (Murdock & Golding, 2005: 60 dikutip di Hardy, 2014: 11).

Kajian konten media dalam ekonomi politik kritis fokus pada bagaimana media dan komunikasi berfungsi untuk menopang kepentingan orang yang memiliki kekuasaan dan kekayaan (Hardy, 2014: 11).

### **Propaganda Model**

Salah satu model penelitian dari perspektif ekonomi politik kritis media adalah Propaganda Model oleh Herman & Chomsky (2010). Model tersebut melihat bahwa terdapat lima filter yang membatasi pemberitaan di media massa: (1) filter *ownership* atau kepemilikan mayoritas dari media massa; (2) filter iklan sebagai pendapatan utama daripada media massa; (3) filter sumber berita, yaitu ketergantungan media pada informasi yang berasal dari sumber pemerintah, bisnis, dan pakar; (4) filter “flak” atau kritik terhadap pemberitaan atau terhadap media itu sendiri; (5) filter “anti-communism” atau “dominant ideology” (Klaehn, 2002: 161) sebagai mekanisme kontrol media. Filter tersebut saling bersilangan dan berinteraksi antara satu sama lain sehingga berita menjadi “kaku dan sempit” (Herman & Chomsky, 2010: 2). Meskipun begitu, Herman mengatakan secara eksplisit bahwa sistem yang membatasi performa media tersebut tidaklah kuat (*all-powerful*) dan juga efek dan variabel yang tak tentu (Herman, 2018).

Karya Herman & Chomsky (2010) digolongkan sebagai pendekatan instrumentalis yang berarti pendekatan yang melihat “bagaimana kapitalis menggunakan kekuatan ekonomi mereka dengan sistem pasar komersial untuk memastikan bahwa arus informasi publik sesuai dengan kepentingan mereka” (Golding & Murdock, 1991: 18). PM juga digolongkan oleh Mosco (2008: 190) sebagai pendekatan ekonomi politik komunikasi pada proses strukturasi yang berarti “proses di mana struktur dibentuk dari agensi manusia, bahkan ketika mereka menjadi “medium” dari struktur itu sendiri” (Mosco, 2008: 185).

Pada penelitian ini, filter ketiga dan kelima PM akan digunakan untuk menelusuri pemberitaan Undang-Undang Cipta Kerja. Filter ketiga PM, yakni narasumber, akan diaplikasikan dengan mengikuti desain penelitian dari DiMaggio (2017). DiMaggio (2017) menemukan bahwa dalam penelitiannya narasumber dan bingkai didominasi oleh kepentingan pemerintah dan pebisnis dalam pemberitaan kebijakan publik. Maka, dapat dikatakan penelitian DiMaggio mengonfirmasi Propaganda Model.

### ***Boundaries of Expressible***

Filter kelima PM, yakni ideologi dominan, akan ditelusuri dengan salah satu analisis oleh Chomsky (1989) yang

dinamakan dengan *Boundaries of Expressible*. Analisis tersebut berusaha untuk melihat “fakta, detail, dan/atau argumen tertentu yang ditampilkan dan absen dalam diskursus media arus utama” (Klaehn, 2009: 49).

Ideologi, dalam perspektif kritis, memiliki salah satu pemahaman yang berarti bentuk dari kesadaran palsu untuk melegitimasi kepentingan grup atau kelas penguasa yang mendominasi dengan cara distorsi dan penipuan – dengan catatan kesadaran palsu bukanlah elemen yang harus selalu muncul (Fuchs, 2020: 221-223). Untuk mengkomunikasikan ideologi tersebut, kelas atau grup yang dominan berusaha untuk menguasai alat produksi budaya – atau dalam kata lain media massa. Media massa dilihat sebagai “mekanisme integrasi sosial” yang berarti media berfungsi “menjaga nilai-nilai kelompok, dan mengontrol bagaimana nilai-nilai itu dijalankan” (Eriyanto, 2002: 145). Nilai-nilai tersebut merupakan konstruksi masyarakat di mana media turut mendefinisikan nilai-nilai itu sehingga tercipta pandangan “apa yang baik, apa yang sesuai, dan apa yang menyimpang” (Eriyanto, 2002: 145). Sesuai pandangan tersebut, Hallin (1989) berpendapat adanya sebuah *media spheres*, yakni media massa beroperasi dalam tiga bidang, yakni bidang konsensus, perdebatan, dan penyimpangan. Bidang konsensus adalah “realitas tertentu

dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok”; bidang penyimpangan adalah sebuah fenomena yang “dikucilkan atau dipandang menyimpang” oleh masyarakat; dan bidang perdebatan adalah bidang yang memperdebatkan isu yang kontroversial, tetapi belum disetujui apakah fenomena tersebut menyimpang (Eriyanto, 2002: 150-151).

Dalam konteks kebijakan publik, spesifiknya kebijakan ekonomi, teori-teori ekonomi pada umumnya memberikan definisi, deskripsi, dan, jika ada permasalahan, preskripsi dari realita yang dihadapi. Teori-teori ekonomi tersebut dilihat tidak lepas dari kepentingan kelas maupun ideologi; maka, dapat dikatakan teori-teori tersebut dapat mengusung atau mendukung spesifik ideologi atau mendukung kebijakan yang menguntungkan kelas tertentu. Untuk mempersingkat pembahasan, teori-teori ekonomi yang akan diteliti muncul atau dominan dalam pemberitaan adalah Neoklasikal, Keynesian, dan Marxist (Wolff & Resnick, 2012). Media massa di sini merupakan situs untuk pertarungan ideologi ekonomi tersebut. Dikaitkan dengan konsep *Boundaries of Expressible*, peneliti akan mencoba menyelidiki apa ideologi ekonomi yang dominan dari ketiga ideologi ekonomi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pluralisme dan Kritik dalam Bingkai dan Narasumber

Tabel 1 Narasumber dalam Berita Langsung UU Cipta Kerja (19/10/2019-05/11/2020)

Aktor	Judul (berdasarkan %)	Lead (berdasarkan %)	Sumber Pernyataan (berdasarkan %)
Koalisi	100	100	89
Oposisi	0	0	11
Aktor	Judul (berdasarkan %)	Lead (berdasarkan %)	Sumber Pernyataan (berdasarkan %)
Pemimpin Organisasi/Asosiasi Pengusaha	0	0	4,4
Tokoh Pengusaha atau Pengusaha	0	0	0,3
Pemimpin Serikat Kerja	0	0	10,8
Tokoh Buruh atau Buruh	0	0	2,2
Akademisi	0	8,3	22,4
Birokrat	11	16,7	16,1
Masyarakat	0	0	3,4
Eksekutif	89	66,7	12,6
Legislatif	0	8,3	15,6
Yudikatif	0	0	0,1
LSM	0	0	9,8
Ormas	0	0	2,3
Jumlah Berita yang Dianalisis		380	

Tabel 1 di atas merupakan rangkuman narasumber yang muncul sebanyak 2587 kali dalam 380 artikel berita langsung yang direpresentasikan secara persentase. Dalam tabel tersebut, jika dilihat dari narasumber partisan terlebih dahulu, partai koalisi menjadi suara tunggal di sisi judul dan lead, dan mendominasi di sumber pernyataan. Dari sisi narasumber umum, narasumber pemerintah menjadi suara tunggal di judul dan mendominasi di lead. Sedangkan dalam sumber pernyataan, narasumber pemerintah dan pebisnis memiliki jumlah 49,1%, diikuti dengan akademisi (22,4%), buruh (13%), LSM (9,8%), masyarakat (3,4%), dan Ormas (2,3%).

Jika dilihat dari narasumber partisan terlebih dahulu, narasumber Presiden Jokowi mendominasi di sisi judul dan lead, dan diikuti oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartato di sumber pernyataan. Beralih ke narasumber umum, di sisi judul dan lead, narasumber pemerintah mendominasi, dengan Presiden Jokowi yang paling sering dikutip. Di sisi sumber pernyataan, kategori akademik menjadi narasumber yang paling sering dikutip, direpresentasikan oleh Direktur Eksekutif KPPOD Robert Andi Jaweng. . Kategori selanjutnya, yakni birokrat, menjadi kategori selanjutnya yang paling sering dikutip, dan direpresentasikan oleh Sekretaris Menko Perekonomian Susi Wijono



Tabel 2 Bingkai dalam Berita Langsung UU Cipta Kerja (19/10/2019-05/11/2020)

<b>Pro</b> (berdasarkan %)	
1) Menciptakan Lapangan Kerja dan Melindungi Pekerja	7
2) Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi	6,1
3) Deregulasi, Memangkas Perizinan, dan Debirokratisasi	5,4
4) Partisipatif dan Terbuka	2,6
5) Menjaga Lingkungan dan Mempercepat Reforma Agraria	2
6) Memudahkan dan Mendukung UMKM	1,6
7) Lain-lain	2,9
<b>Kontra</b>	
1) Mereduksi Hak-Hak atau Merugikan Pekerja	15
2) Minim Keterbukaan dan Partisipasi	13,8
3) Demo/ Unjuk Rasa/ Menolak UU Cipta Kerja	9,7
4) Cacat Prosedur dan Regulasi	8,8
5) Memperparah Krisis Lingkungan dan Reforma Agraria	6
6) Covid-19 dan Cipta Kerja	4,4
7) Memperlemah Pemerintah Daerah	3,9
8) Merugikan Petani dan Nelayan	3,5
9) Hanya Untuk Kepentingan Tertentu	2,9
10) Lain-lain	3,6
<b>Netral</b>	
1) Perhatikan substansi dan implementasi UU/ Libatkan semua pihak dalam pembahasan/ Buka ruang dialog	0,8

Moegiarso Dari kategori legislatif, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas menduduki pos puncak sebagai narasumber yang paling sering dikutip.

Jika dilihat dari narasumber antara pengusaha dan pekerja, kategori pekerja lebih sering dikutip daripada pengusaha, dengan Sekjen OPSI Timboel Siregar dari kelompok pekerja yang paling sering dikutip dan Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani yang paling sering dikutip dari kelompok pengusaha. Selain itu, beberapa narasumber lainnya dikutip, seperti Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dari kategori eksekutif, Peneliti Formappi Lucius Karus dari kategori LSM, serta

pejabat di Ormas Muhammadiyah dan NU dan masyarakat menjadi narasumber yang dikutip di pemberitaan.

Beralih ke bingkai, Tabel 2 di atas merupakan rangkuman bingkai yang muncul sebanyak 3055 bingkai dalam 381 artikel berita langsung yang direpresentasikan secara persentase. Bingkai kontra (71,6%) mendominasi dibandingkan dengan bingkai pro (27,6%). Tema-tema bingkai kontra yang muncul bersifat beragam dan proaktif, datang dari berbagai narasumber dengan yang paling dominan adalah kritik dari pekerja pada substansi klaster ketenagakerjaan yang dianggap mereduksi hak-hak dan

merugikan pekerja. Sedangkan bingkai pro kebanyakan datang dari sumber pemerintah dan pebisnis dan bersifat reaktif, dengan bingkai yang paling sering muncul adalah UU Cipta Kerja akan menciptakan lapangan kerja dan melindungi pekerja. Bingkai netral (0,8%) hanya muncul beberapa kali saja yang mencoba mencari jalan tengah dan mengakomodasi kedua belah pihak dengan membuka ruang dialog.

Dari total 10 tema bingkai kontra, bingkai yang paling sering muncul adalah (1) “Mereduksi Hak-hak atau Merugikan Pekerja” (15%). Bingkai ini melihat bahwa fleksibilitas lapangan kerja yang diusung melalui UU Cipta Kerja akan mereduksi dan menghilangkan hak-hak buruh, seperti upah dan pesangon yang terancam akan berkurang, dipermudah dan hilangnya perlindungan kepada buruh jika di PHK, hubungan kerja kontrak yang dapat diperpanjang terus menerus dan alih daya yang diperluas, serta hak-hak buruh lainnya yang terancam hilang seperti hak cuti, jam kerja, dan jaminan sosial. Program JKP yang diusung oleh pemerintah juga dilihat akan membebani negara dan merugikan pekerja. Pada periode pembahasan, dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan dianggap hanya sebuah *gimmick*, tipuan politik dan upaya untuk meredam demonstrasi buruh karena tidak ada jaminan dikeluarkannya klaster ketenagakerjaan. Selain itu, bingkai kontra

lainnya melihat klaster ketenagakerjaan merupakan bentuk dari sistem perbudakan modern, berpotensi menjadi pasal karet, memperburuk praktik penggunaan TKA, tidak mengatasi persoalan pekerja perempuan dan rumah tangga, diragukan menambah lapangan kerja, dan ketenagakerjaan sendiri bukanlah faktor penghambat investasi.

Sedangkan Dari total 7 tema bingkai pro, bingkai yang paling sering muncul adalah (1) “Menciptakan Lapangan Kerja dan Melindungi Pekerja” (7%). Bingkai ini menjadi wacana utama bingkai pro pada masa pra-pembahasan dan pasca-pembahasan. Pandangan dari bingkai ini adalah UU Cipta Kerja akan menciptakan lapangan pekerjaan, mengatasi hambatan-hambatan ketenagakerjaan, dan melindungi pekerja melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Bingkai yang paling sering disampaikan oleh pemerintah, spesifiknya kategori eksekutif ini, juga membantah beberapa tuduhan yang disematkan pada UU Cipta Kerja, seperti upah minimum tetap ada dan tidak dapat ditangguhkan, TKA yang masuk memperhatikan kompetensi, hak cuti tetap ada, perusahaan tidak bisa PHK sepihak, dan PKWT dan alih daya memang dilonggarkan, tetapi aturan turunan akan melindungi pekerja. Ditambah lagi, pelanggaran aturan ketenagakerjaan dilihat

akan meningkatkan produktivitas dan menarik investor padat karya.

Selain itu, beberapa bingkai pro-kontra lainnya menjadi diskursus lainnya dalam pemberitaan UU Cipta Kerja. Jika dilihat dari bingkai kontra terlebih dahulu, UU Cipta Kerja dilihat minim secara keterbukaan dan partisipasi, ditolak oleh beragam kalangan masyarakat, cacat secara prosedur dan regulasi, akan memperparah krisis lingkungan dan reforma agraria, tidak fokus pada penyelesaian pandemi Covid-19, memperlemah Pemda, merugikan petani dan nelayan, dan dilihat hanya untuk kepentingan tertentu.

Sedangkan dari sisi bingkai pro, beberapa bingkai lainnya terdiri dari UU Cipta Kerja akan meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi; memangkas regulasi, perizinan, dan birokrasi; telah dilakukan secara partisipatif dan terbuka; akan menjaga lingkungan dan mempercepat reforma agraria; memudahkan dan mendukung UMKM; dan beberapa bingkai lainnya yang melihat UU Cipta Kerja akan memajukan ekonomi Indonesia.

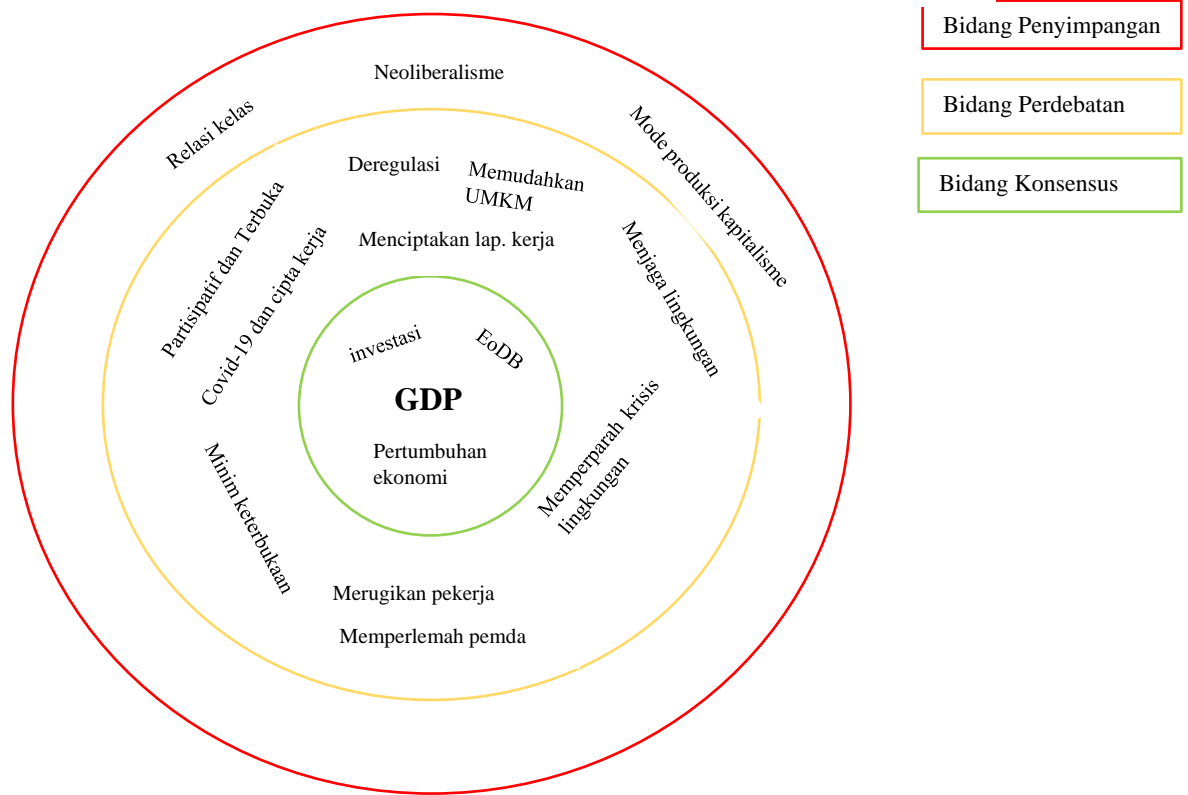
Dari kedua temuan data tersebut, pola pemberitaan UU Cipta Kerja mengindikasikan performa media *Kompas* cenderung menunjukkan pluralitas daripada bias pemerintah dan pebisnis. DiMaggio (2017: 32-35) menjelaskan pluralitas dalam pemberitaan ditunjukkan

dengan pemberitaan memberdayakan masyarakat; reporter membolehkan beragam kepentingan, baik dari aktor grup kepentingan, LSM, Ormas, atau masyarakat itu sendiri, muncul dan memiliki pengaruh yang bermakna dalam pemberitaan; ditambah lagi, kepentingan korporasi-korporasi dikritisi dan, dalam isu ketenagakerjaan, reporter meringkai pemberitaan mengikuti kepentingan pekerja.

Maka, dapat dikatakan temuan dari sisi bingkai dan narasumber bertolak belakang dengan model performa media bias pemerintah dan pebisnis yang diajukan oleh DiMaggio. Dalam penelitian DiMaggio, pemerintah mendominasi 75% dalam kutipan pemberitaan. Dalam penelitian ini, kutipan pemerintah dan pebisnis jika digabungkan, di sisi sumber pernyataan, hanya 49,1% – jauh dari kata dominasi dalam kutipan pemberitaan jika mengikuti standar persentase DiMaggio. Pluralisme narasumber dalam sumber pernyataan diikuti dengan kekayaan dan kedalaman kritik, baik dalam berita langsung maupun dalam editorial, feature, dll., juga menunjukkan minimnya dominasi pemerintah dalam keseluruhan wacana pemberitaan mengenai UU Cipta Kerja. Maka, penelitian ini juga bertolak belakang dengan filter ketiga PM yang menduga adanya dependensi terhadap narasumber dan bingkai pemerintah.

## Perdebatan Ekonomi yang Terbatas

Figur 1 Boundaries of Expressible dalam Pemberitaan UU Cipta Kerja



Figur 1 di atas merupakan representasi seluruh perdebatan yang muncul dalam pemberitaan UU Cipta Kerja. Dapat dilihat bahwa asumsi dasar perdebatan adalah GDP yang merupakan tujuan dasar dari UU Cipta Kerja. menjadi dasar pemerintah untuk menjustifikasi berbagai tujuan, seperti deregulasi, investasi, target angka pertumbuhan ekonomi, dll., yang dinilai melalui berbagai instrumen, salah satunya *Ease of Doing Business* (EoDB). Maka, naikturunnya GDP dilihat oleh pemerintah sama dengan, atau memiliki pengaruh besar pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam memperdebatkan asumsi dasar tersebut, spesifiknya dalam isu ekonomi dan ketenagakerjaan, teori ekonomi Neoklasik-Keynesian merupakan batasan (*boundaries*) arena dalam pemberitaan. Dari sisi ekonomi terlebih dahulu, pada periode pra-pembahasan, *Kompas* memiliki posisi yang sejalan dengan UU Cipta Kerja yang melihat bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi 5% per tahun tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai problematika ekonomi; melainkan, dengan cara investasilah permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Beberapa artikel kolom dan analisis dan opini manufaktur pandangan konsensus dari perspektif

Neoklasik yang melihat bahwa berbagai permasalahan ekonomi global dan domestik yang berpotensi memperkeruh stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diatasi melalui kemudahan berbisnis dengan cara deregulasi sehingga dapat menarik investasi.

Beberapa analisis ekonomi politik muncul yang melihat UU Cipta Kerja akan menciptakan “*trickle down effects*” yang akan “memberikan dasar kemakmuran material bagi rakyat” dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari sekadar 5% per tahun melalui deregulasi seperti pada pertengahan 1980-an. Beberapa artikel opini lainnya, yang tidak secara eksklusif melihat dari sisi ekonomi seperti dari sisi klaster birokrasi, UMKM, serta pangan dan pertanian, juga mengikuti solusi dari perspektif Neoklasik. Penggunaan instrumen EoDB menjadi dasar justifikasi dari argumen beberapa artikel tersebut.

Meski begitu, perspektif Neoklasik tidak tanpa persaingan. Beberapa artikel kolom dan analisis melihat secara Keynesian bahwa UU Cipta Kerja tidak mengincar sektor investasi padat karya sehingga, jika dinilai melalui *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR), investasi tersebut tidak akan secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Ditambah lagi, menurunnya pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, dan investasi

pada akhir 2020 juga dilihat tidak akan diselesaikan melalui UU Cipta Kerja; sebaliknya, UU tersebut malah mengancam pemberantasan korupsi, lingkungan, dan pekerja.

Fetisisasi diskusi salah satu dimensi ekonomi, seperti ketenagakerjaan, pun tersublimasi dalam arena perdebatan Neoklasik-Keynesian tersebut, dan, tentunya, pertumbuhan ekonomi menjadi asumsi dasar. Pada periode pembahasan, beberapa artikel feature dan riset secara kritis dan mendalam membahas pro-kontra dari beberapa revisi pasal pada UU Ketenagakerjaan. Namun, pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tujuan dasar dalam artikel tersebut yang direpresentasikan melalui instrumen kuantitatif Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mengindikasikan kesejahteraan pekerja. Dalam artikel opini, konsep produktivitas, penawaran dan permintaan di pasar kerja, dan kesejahteraan pekerja yang diukur secara kuantitatif melalui pendapatan merupakan batu bata yang membangun argumen pentingnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi; dan, dengan memberikan keleluasaan kepada pengusaha, investasi dapat masuk sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada periode pembahasan, beberapa artikel kembali menyoalkan beberapa revisi pada klaster ketenagakerjaan yang dilihat

tidak akan menyejahterakan pekerja, memperparah ketimpangan pendapatan, tidak meningkatkan produktivitas, dan tidak akan menarik investasi berkualitas. Salah satu program pada klaster ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dilihat, di satu sisi, merupakan cara pemerintah untuk memberikan fleksibilitas di pasar kerja dan keamanan kepada pekerja (*flexicurity*), tetapi, di sisi lain, dilihat akan membebani negara dan pekerja karena dana yang didapatkan bersumber dari negara dan pekerja itu sendiri. Namun, perhatikan secara seksama bahwa analisis ketenagakerjaan dalam beberapa artikel tersebut berfokus pada masalah periferi, yakni permasalahan yang merupakan “efek” dari sistem mode produksi kapitalisme, seperti upah minimum, alih daya, PHK, dll., daripada permasalahan *core* (utama/pusat), yakni divisi relasi kelas antara pengusaha dan pekerja yang merupakan sumber dari konflik tiada henti tersebut.

Hal ini pun dikonfirmasi kembali pada peralihan fokus dalam pemberitaan pada periode pasca-pembahasan di mana empat dari sepuluh artikel feature secara langsung mewawancarai pekerja, mencolokkan berbagai kesusahan dan tak tentunya kehidupan yang mereka jalani, tetapi tanpa mempertanyakan atau mengkritik sistem atau struktur yang

memperbolehkan keberlangsungan hal tersebut. Beberapa artikel opini kembali mempersoalkan berbagai revisi pasal pada klaster ketenagakerjaan. Dari sisi JKP, program yang berasal dari konsep *flexicurity* itu dilihat akan “memperlebar ketimpangan antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil” – meski ada konsensi JKP dilihat sebagai “terobosan” bagi pekerja kontrak dan kompensasi PHK. Dari sisi upah minimum, pengaturan upah minimum melalui PP 78 Tahun 2015 dilihat akan menjadikan kenaikan upah “kian menipis dan terbatas”. Perhatikan frasa “upah minimum” (*minimum wage*) dan “antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil”, keduanya merupakan istilah dan perspektif yang telah tersublimasi dalam logika mode produksi kapitalisme; bertolak belakang dengan istilah “upah layak” (*living wage*) yang perhitungannya berbeda dari PP 78, dan dualitas antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil merupakan divisi tenaga kerja yang merupakan produk dari sistem mode produksi kapitalisme. Lebih lanjut tentang upah, kemelut penghitungan upah minimum dan hilangnya penghitungan upah berdasarkan KHL dianggap oleh *Kompas* “membuat ciut investor dan memperkeruh iklim berusaha”.

Maka, merangkum dan memperjelas kembali analisis di atas, dari keseluruhan pemberitaan artikel editorial,

feature, dll., diskusi ekonomi hanya berkuat pada teori Neoklasik-Keynesian dan tidak mengkritik asumsi tujuan dasar dari UU Cipta Kerja. Dari sisi ketenagakerjaan, perdebatan bergumul pada permasalahan periferi, seperti upah minimum, alih daya, PHK, pesangon, jam kerja, dll., tanpa mempertanyakan struktur atau sistem yang menaungi relasi kelas antara pengusaha dan pekerja.

### **Konvergensi Analisis Data**

Dari dua analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa media massa, pada saat yang sama, memberikan beragam pandangan narasumber dan kritis terhadap UU Cipta Kerja, di satu sisi, dan bias kepada kepentingan pemerintah dan pebisnis dalam perspektif dan perdebatan ekonomi dan ketenagakerjaan, di sisi yang lain. Lantas, bagaimana menggabungkan kedua temuan yang kontradiktif ini?

Untuk menggabungkan kedua temuan tersebut, pandangan Bennet & Lawrence (1995) dapat mengintegrasikan kedua temuan yang kontradiktif itu. Mereka mengatakan bahwa:

*The same market imperatives and journalistic norms and routines which so often produce cultural products that reinforce dominant ideological views can also at times produce cultural products that*

*challenge the status quo and dominant ideology* (Bennet & Lawrence, 1995: 21)

Merujuk kutipan di atas, penelitian ini tidak hanya mengungkapkan adanya kontestasi pandangan yang terkadang (*at times*) menantang status quo, tetapi kontestasi itu menjadi fitur dominan dalam pemberitaan. Sebaliknya, pandangan yang memperkuat perspektif ideologi dominan tetap muncul dan dominan dalam diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan, tetapi tidak secara luas mendominasi dalam pemberitaan. Maka, penelitian ini mengungkapkan, mengonfirmasi pandangan ekonomi politik Hesmondhalgh (2002), bahwa terdapat kompleksitas, kontestasi, dan ambivalensi dalam produksi konten media massa yang menghasilkan kontradiksi dalam pemberitaan. Hal ini berimplikasi pandangan performa media secara instrumental oleh Herman & Chomsky (2010) tidaklah sesuai dengan temuan data dalam studi kasus dalam penelitian ini. Ideologi kapitalisme atau neoliberalisme, misalnya, sebagai sebuah ide kelas penguasa yang direpresentasikan di media massa tidaklah muncul secara mekanistik dan deterministik, melainkan merupakan proses informasi yang harus diproduksi dan direproduksi sehingga membuka celah kontestasi dan kontradiksi dalam pemberitaan.

Meski begitu, konsep *Boundaries of Expressible* Herman & Chomsky dikonfirmasi dalam penelitian ini di mana tak ada artikel yang secara mendalam mengkritik tujuan utama dari UU Cipta Kerja, yakni GDP – atau sistem mode produksi yang menaungi hubungan antara pemilik modal dan pekerja yang menyebabkan konflik tiada henti. Maka, supaya PM dapat memiliki penjelasan yang cukup (*explanatory adequacy*) dalam menjelaskan performa media, model-model lainnya, spesifiknya *elite-driven paradigm*, diperlukan untuk melengkapi kekurangan PM; ditambah juga dengan penelitian dari sisi produksi dan resepsi dari konten media massa.

Kembali ke persoalan bias media, kontradiksi temuan data dalam penelitian ini memperkuat tesis bias media secara institusional atau struktural yang berpendapat bahwa bias media dibentuk oleh rutinitas organisasi atau secara institusional yang secara sistematis memproduksi pemberitaan yang bias pemerintah dan pebisnis. Jika dilihat dari teori strukturasi, reporter dan editor di *Kompas*, ataupun penulis secara umum di kolom dan analisis dan opini, dapat menulis artikel atau berita secara kritis, tetapi mereka tidak bisa menulis sesuai dengan keinginan mereka sendiri; mereka juga turut dipengaruhi oleh struktur di dalam organisasi *Kompas* atau sistem sosial

masyarakat. Seperti kata Hall (2005), institusi media massa, pada saat yang sama, tidak hanya bebas dari paksaan dan batasan, tetapi juga bebas untuk mengartikulasikan dirinya sendiri secara sistematis dalam sebuah situasi yang menguntungkan penguasa. Di sini ideologi beroperasi tanpa harus ada niatan dari agensi, melainkan dimanifestasikan di media massa tanpa sadar, yang merupakan struktur yang dalam (*deep structure*) dari tata kelola organisasi di masyarakat yang diterima secara cuma-cuma, sehingga ia mereproduksi ideologi dominan dalam diskursus di media massa. Jika dikaitkan dengan pemberitaan UU Cipta Kerja, maka reporter dan editor, atau secara umum penulis di *Kompas*, dapat bersikap kritis dan menantang status quo, tetapi dalam sikap kritis tersebut mereka tetap dipengaruhi oleh struktur, yakni mode produksi kapitalisme, secara sadar maupun tidak sadar, dalam pemberitaan yang mereka tulis.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan didapatkan mengikuti dari pertanyaan penelitian yang telah diajukan:

1. Tidak ditemukan bias pemerintah dan pebisnis pada narasumber yang muncul dalam pemberitaan UU Cipta Kerja. Narasumber pemerintah mendominasi



di sisi judul dan lead, sedangkan di sisi sumber pertanyaan mengindikasikan adanya pluralitas narasumber.

2. Tidak ditemukan bias pemerintah dan pebisnis pada bingkai yang muncul dalam pemberitaan UU Cipta Kerja. Bingkai kontra lebih mendominasi daripada bingkai pro.
3. Ditemukan bias pemerintah dan pebisnis dalam ideologi ekonomi yang muncul dalam pemberitaan UU Cipta Kerja. Diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan didominasi oleh teori ekonomi Neoklasik-Keynesian yang pada dasarnya mendukung tujuan dari UU Cipta Kerja.
4. Dari tiga kesimpulan di atas, maka dapat dikatakan performa media *Kompas* dilihat dari perspektif ekonomi politik kritis mengindikasikan adanya kompleksitas, kontestasi, dan ambivalensi dalam pemberitaan UU Cipta Kerja.

### **Rekomendasi**

1. Secara teoritik, penelitian ini berimplikasi bahwa performa media massa secara instrumental di mana pemberitaan secara statik dan deterministik akan menguntungkan penguasa tidak ditemukan dalam penelitian ini. Sebaliknya, pemberitaan menunjukkan adanya kontestasi, kompleksitas, dan

ambivalensi dalam perdebatan di media massa. Maka, saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah digabungkannya Model Propaganda (PM) dengan model atau teori lainnya, spesifiknya dari *elite-driven paradigm*, dan dilakukan penelitian yang komprehensif, baik di sisi studi kasus yang luas pada kebijakan ekonomi dan juga penelitian di sisi produksi konten media dan juga resepsi terhadap konten tersebut.

2. Secara praktis, penelitian ini berimplikasi bahwa performa media massa, di satu sisi, telah memuat berbagai pandangan narasumber dan kritis terhadap UU Cipta Kerja, dan terbatas dalam diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan, di sisi yang lain. Maka, saran peneliti kepada praktisi media adalah perlunya keluasan dan kedalaman diskusi ekonomi dan ketenagakerjaan yang mencakup berbagai alternatif teori ekonomi.
3. Secara sosial, penelitian ini berimplikasi secara kuantitas berbagai aktivis baik dari LSM atau ormas, akademisi, dan buruh dapat menyamai suara dan pandangan dari pemerintah. Namun, secara kualitas kedalaman dan keluasan diskusi, spesifiknya dalam isu ekonomi dan ketenagakerjaan, belum menyentuh beragam pandangan ekonomi dan

masalah utama dalam ketenagakerjaan. Maka, saran peneliti adalah perlunya ada sebuah strategi baru dari ekonom-ekonom, ahli ketenagakerjaan, dan buruh sendiri yang memiliki pandangan alternatif untuk menyuarakan pandangan mereka secara intens di media massa, spesifiknya di *Kompas* sebagai salah media massa elite.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amania, N. (2020). Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209-220.
- Bennett, W. L., & Lawrence, R. G. (1995). News icons and the mainstreaming of social change. *Journal of Communication*, 45(3), 20-39.
- Blomkamp, E., Sholikin, M. N., Nursyamsi, F., Lewis, J. M., & Toumbourou, T. (2017). Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle. *KSI Working Paper*, 26, 1-45. <https://www.ksi-indonesia.org/en/news/detail/understanding-policy-making-in-indonesia-in-search-of-a-policy-cycle>
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pekerja Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Damuri, Y. R., Rafitrandi, D., Friawan, D., Hirawan, F. B., Aswicahyono, H., Titiheruw, I. S., & Barany, L. J. (2021). Investasi Dan Perjanjian IEU CEPA. In *Memetik Keuntungan Dari Perjanjian Ekonomi Transformatif: Studi Mengenai Indonesia-Eu Comprehensive Economic Partnership Agreement* (pp. 65-80). Centre for Strategic and International Studies. <http://www.jstor.org/stable/resrep316507>
- DiMaggio, A. R. (2017). *The Politics of Persuasion: Economic Policy and Media Bias in the Modern Era*. SUNY Press.
- Eriyanto. (2002). *Analisis framing: konstruksi, ideologi, dan politik media*. Yogyakarta: LKiS
- Fuchs, C. (2020). *Communication and Capitalism: A Critical Theory*. University of Westminster Press.
- Ginting, Y. P. (2021). Perspektif Pluralisme Hukum Pasca Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 59-71.
- Golding, P., & Murdock, G. (1991). Culture, communications and political economy. *Mass media and society*, 2(1), 15-32.

- Hall, S. (2005). The rediscovery of 'ideology'; return of the repressed in media studies. In *Culture, society and the media* (pp. 52-86). Routledge.
- Hardy, J. (2014). *Critical political economy of the media: An introduction*. Routledge.
- Hesmondhalgh, D. (2002). *The Cultural Industries*. Sage Publications.
- Hendriyanto, K. (2020). Liberalisasi Importasi Produk Pertanian dalam UU Cipta Kerja dari Pemikiran Hukum Progresif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(2), 136-168.
- Herman, E. S. (2018). The propaganda model revisited. *Monthly Review*, 69(8), 42-54.
- Herman, E. S., & Chomsky, N. (2010). *Manufacturing consent: The political economy of the mass media*. Random House.
- Julianti, L. (2021). Kajian Yuridis Terkait Pengembangan Iklim Investasi Indonesia Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 20-40.
- Klaehn, J. (2002). A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky's Propaganda Model. *European Journal of Communication*, 17(2), 147-182.
- Klaehn, J. (2009). The propaganda model: Theoretical and methodological considerations. *Westminster Papers in Communication and Culture*, 6(2), 43-58.
- Koalisi Bersihkan Indonesia. (2020). *Omnibus Law: Kitab Hukum Oligarki*. [https://walhi.or.id/uploads/buku/Laporan%20OL%20Kitab%20Hukum%20Oligarki\\_BI\\_FRI-min.pdf](https://walhi.or.id/uploads/buku/Laporan%20OL%20Kitab%20Hukum%20Oligarki_BI_FRI-min.pdf)
- Lingga, M.A. (2019, 20 Oktober). *Pidato Jokowi: Insya Allah, 2045 Indonesia Telah Keluar dari Jebakan Pendapatan Kelas Menengah*. Kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2019/10/20/174107226/pidato-jokowi->
- Mahy, P. (2021). Indonesia's omnibus law on job creation: reducing labour protections in a time of COVID-19. *Labour, Equality and Human Rights (LEAH) Research Group, Working Paper*, (23).
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). Investasi Asing Dan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2)
- Mcnaair, Brian. (2011). *An introduction to political communication* (5th ed). Oxon: Routledge
- Mosco, Vincent. (2009). *The Political Economy of Communication* (2th ed). SAGE Publications.Inc
- Reese, S. D., & Lee, J. K. (2012). Understanding the content of news media. *The SAGE handbook of political communication*, 253-263.

Setyawan, Y. (2020). Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(1), 150-164.

Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2013). *Mediating the message in the 21st century: A media sociology perspective*. Routledge.

Wolff, R. D., & Resnick, S. A. (2012). *Contending economic theories: Neoclassical, Keynesian, and Marxian*. MIT Press.